KONSINYERING PENYUSUNAN LHP LKPD TA 2018

Pada tanggal 6 s.d. 10 Mei 2019 Bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 atas 15 Entitas di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Ade Iwan Ruswana selaku Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh tim pemeriksa LKPD TA 2018 termasuk tim Kantor Akuntan Publik yang diperbantukan atas nama BPK.

PENGARAHAN & BUKA PUASA BERSAMA AUDITOR UTAMA KN VI

Senin, 20 Mei 2019, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Auditor Utama KN VI, Bapak Dori Santosa didampingi Kepala Perwakilan, Bapak Ade Iwan Ruswana memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengarahan dimaksudkan untuk kembali menekankan kepada pegawai bahwa dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan harus mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara serta disusun tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas, dan seringkas mungkin. Selain itu, pegawai juga dihimbau untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja serta rajin mengembangkan diri agar hasil pekerjaan lebih berkualitas. Tidak lupa juga diingatkan untuk memegang teguh nilai dasar Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Acara ditutup dengan siraman rohani yang memberikan pemahaman mengenai hikmah dari berpuasa dan dilanjutkan dengan santap hidangan buka puasa bersama keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

MEDIA WORKSHOP: MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK MELALUI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Jum'at, 24 Mei 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan media workshop dengan tema " Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik Melalui Hasil Pemeriksaan BPK" di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen BPK dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 pada 15 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah dan BPK berkewajiban untuk memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan tersebut kepada masyarakat luas melalui media. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana, Kepala Subauditorat Kalteng I, Bpk. Ali Wardhana, dan Kepala Subauditorat Kalteng II, Bpk. M. Suharyanto. Sedangkan insan media yang mengikuti kegiatan ini sebanyak + 30 orang dari berbagai media baik media cetak maupun media elektronik.

Dalam pemaparannya, Bpk. Ade Iwan Ruswana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Penecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 14 Pemerintah Daerah dan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 pada satu Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Seruyan. Selama pemeriksaan, BPK menemukan sebanyak Rp50,4 Milyar temuan kelebihan pembayaran dan Rp7,9 Milyar temuan kekurangan penerimaan. Kelebihan pembayaran terjadi pada belanja modal (fisik, jasa konsultansi, pengadaan tanah) sebesar Rp37 Milyar, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp5 Milyar, kelebihan pembayaran belanja hibah uang/ barang kepada masyarakat sebesar Rp4,6 Milyar, kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp750 juta, kelebihan pembayaran perjalanan dinas non DPRD sebesar Rp1,5 Milyar, pengelolaan kas sebesar Rp1,2 Milyar, dan kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp304,9 juta.

Atas total temuan sebesar Rp58,3 Milyar tersebut, telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp18,6 Milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp39,7 miliar, diharapkan dapat disetorkan ke Kas Daerah pada saat pemantauan tindak lanjut nanti. Selain itu, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, diantaranya

1. Pengelolaan dan pencatatan aset tetap dan aset lain-lain yang belum memadai;
2. Masih terjadi SP2D-LS ditransfer ke Bendahara Pengeluaran dalam jumlah yang cukup signifikan;
3. Laporan keuangan BLUD RSUD yang belum diaudit oleh KAP

Pelaksanaan media workshop ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait tata kelola keuangan daerah kepada masyarakat luas dan sebagai kontrol sosial atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENYERAHKAN LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA. 2018

Jum'at, 24 Mei 2019, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 untuk tujuh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Katingan, dan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium kantor BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. Laporan hasil pemeriksaan langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili. LHP tersebut diserahkan kepada DPRD dan Kepala Daerah setelah BPK melaksanakan pemeriksaan atas LKPD TA 2018 sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Dalam sambutannya, Bpk. Ade Iwan Ruswana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD TA 2018 pada Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Katingan, dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Seruyan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2018. Hal yang menjadi dasar pemberian opini WDP tersebut adalah hasil pemeriksaan atas realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan menunjukkan bahwa volume lima pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai spesifikasi kontrak, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp7,9 miliar yang melebihi batas nilai materialitas dan Pemerintah Kabupaten seruyan belum mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah sampai dengan tanggal penerbitan LHP atas LKPD TA 2018. Bpk. Ade Iwan Ruswana memberikan selamat kepada enam Pemerintah Daerah yang dapat meraih dan mempertahankan opini WTP. BPK selalu mendorong dan mengharapkan Pemerintah Kabupaten Seruyan tetap bersemangat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan agar dapat meraih opini WTP kembali pada tahun mendatang.

BPK mengharapkan Pemerintah Daerah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan pada TA 2018. Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

TUJUH PEMERINTAH DAERAH MEMPEROLEH OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2018

Selasa, 21 Mei 2019, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 untuk tujuh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium kantor BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. Laporan hasil pemeriksaan langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili. LHP tersebut diserahkan kepada DPRD dan Kepala Daerah setelah BPK melaksanakan pemeriksaan atas LKPD TA 2018 sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Dalam sambutannya, Bpk. Ade Iwan Ruswana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD TA 2018 pada tujuh Pemerintah Daerah tersebut. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pencapaian opini WTP ini adalah untuk kelima kalinya bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, pencapaian opini WTP ini adalah untuk yang ketiga kalinya. Dan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, pencapaian opini WTP ini adalah untuk yang kedua kalinya.

BPK mengharapkan Pemerintah Daerah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan pada TA 2018. Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

TAHETA
Edisi II/2019

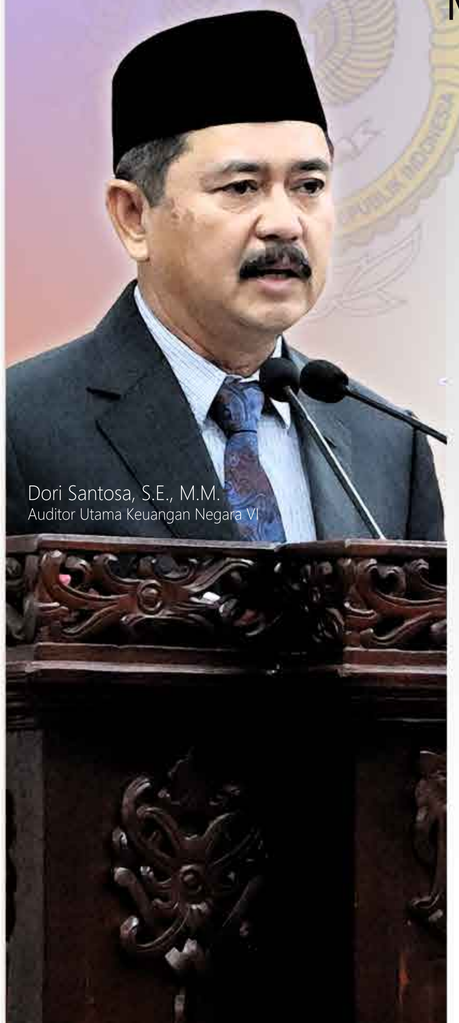

Dori Santosa, S.E., M.M.
Auditor Utama Keuangan Negara VI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MEMPERTAHANKAN OPINI WTP

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.

Pada hari Senin 20 Mei 2019, telah dilaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2018 oleh BPK RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Dori Santosa sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI (Tortama VI), Bapak Ade Iwan Ruswana sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa pejabat struktural dan Fungsional Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Kegiatan ini LHP LKPD TA 2018 diserahkan langsung oleh Bapak Dori Santosa kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak R.Atu Narang dan Bapak Habib Ismail Bin Yahya sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Bpk. Dori Santosa menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2018. Pencapaian opini WTP ini adalah yang kelima kalinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun demikian, tanpa mengesampingkan keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya:

1. Penetapan besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah belum sesuai realisasi pendapatan sehingga terjadi kekurangan penetapan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp40,36 miliar;
2. Pengelolaan, pencatatan dan pelaporan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya tertib dan memadai;
3. Terjadi kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis dalam beberapa pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa.

BPK mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan pada TA 2018. Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

BERBAGI TAKJIL JELANG BERBUKA PUASA

Menjelang waktu berbuka puasa pada tanggal 23 – 24 Mei 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembagian takjil gratis kepada pengendara yang melintasi depan gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam waktu yang singkat, ratusan paket takjil habis diberikan. Pembagian takjil gratis ini dilakukan ketika menjelang waktu berbuka puasa supaya para pengendara dapat berbuka puasa tepat waktu. Kegiatan ini juga semakin mempererat hubungan kekeluargaan yang telah terjalin antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan masyarakat. Takjil yang dibagikan bersumber dari donasi para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Sabtu, 1 Juni 2019, pukul 08.00 WIB di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng, Bapak Ade Iwan Rusawana dan sebagai komandan upacara Bapak Suwito.

Upacara dilaksanakan dengan pengibaran bendera. Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara membacakan naskah Pancasila dan diikuti seluruh peserta upacara. Selanjutnya, petugas upacara membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada upacara tersebut, seluruh peserta upacara menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

Pada upacara tersebut, Inspektur Upacara membacakan sambutan Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPIP RI menyampaikan untuk terus menerus secara konsisten merealisasikan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan negara yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia. Plt. Kepala BPIP RI juga menghimbau untuk bersatu membangun bangsa guna merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Upacara ditutup dengan pembacaan doa

VERIFIKASI OLEH KOMISI INFORMASI PUBLIK

Guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Ibu Setni Betlina melakukan verifikasi dan penilaian terhadap pelaksanaan keterbukaan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Juni 2019 di Ruang Rapat Kepala Perwakilan Lantai 3 dan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Bapak Ade Iwan Ruswana dan didampingi oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Publik Menuju Informatif, dan Badan Publik Tidak Informatif.

Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Kepala Perwakilan tentang pelayanan publik yang telah dan sedang berjalan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selalu berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Adapun wujud pelaksanaan komitmen tersebut antara lain: adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), adanya website yang berisikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta informasi yang wajib tersedia setiap saat, adanya Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), dan dilaksanakannya media relation. Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah 9 kali menerima permohonan permintaan informasi dan telah diselesaikan secara tuntas serta menerima 75 buah pengaduan masyarakat dan telah didisposisikan kepada Kepala Subauditorat untuk dipertimbangkan menjadi bahan pemeriksaan. Selain itu, berdasarkan survey, pihak yang menerima layanan PIK sangat puas terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Setelah pemaparan oleh Kepala Perwakilan selesai, komisioner KIP, Ibu Setni Betlina menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas komitmen dan konsistensinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, Tim Penilai melakukan verifikasi dokumen pendukung dan melakukan penilaian atas keterbukaan informasi publik yang dilakukan. Adapun hasil penilaian nantinya akan diklasifikasikan dalam tiga jenis, yakni Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif, dan Badan Publik Tidak Informatif.

UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, pada hari Senin, 20 Mei 2019, pukul 08.00 WIB di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalteng, Ibu Mardiah dan sebagai komandan upacara Bapak Suwito.

Upacara dilaksanakan dengan pengibaran bendera. Dalam upacara tersebut, petugas upacara membacakan naskah Pancasila dan diikuti seluruh peserta upacara. Selanjutnya, petugas upacara membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada upacara kali ini seluruh peserta upacara menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Bagimu Negeri.

Pada acara tersebut, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menkominfo RI merumuskan tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu "Bangkit untuk Bersatu", serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menghidupi persatuan dengan semangat gotong royong. Dengan semangat gotong-royong, Indonesia diproyeksikan akan segera menjemput harkat dan martabat baru dalam aras ekonomi dunia. Upacara ditutup dengan pembacaan doa.

ANJANGSANA KE PANTI ASUHAN LKSA EL MINISTRY

Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-62 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, dilaksanakan kegiatan bakti sosial atau Anjangsana pada tanggal 30 April 2019 di Panti Asuhan LKSA EL MINISTRY Palangkaraya, Jl. Junjung Buih III Gang Kameloh No. 4, Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa instansi Pemerintah dan Pihak Swasta. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Ibu Mardiah didampingi pejabat struktural lainnya, ditunjuk sebagai pimpinan rombongan.

Anjangsana yang kita lakasanakan sekarang ini merupakan wujud nyata silahturahmi antara Pejabat Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta dengan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), baik yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah.
Rombongan Anjangsana terdiri atas berbagai instansi, antara lain dari Kantor Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Badan Kepegawaian, dan Biro Umum Setda Provinsi Kalteng, dll. Kegiatan Anjangsana yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian kepada para penghuni Panti Asuhan dengan memberikan bantuan berupa sembako dan perlengkapan lainnya yang langsung diserahkan kepada Pengurus Panti Asuhan